

## Andi Arief Bantah SBY Minta Rp9 M untuk Bangun Museum

JAKARTA (IM) - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diterpa isu kurang sedap. Pembangunan Museum SBY-ANI Jalan Lingkar Selatan (JLS), Pacitan, Jawa Timur, dituding meminta dana bantuan Pemkab Pacitan senilai Rp9 Miliar.

Namun politisi Partai Demokrat, Andi Arief, membantah hal itu dan ditegaskannya abahwa hal itu fitnah yang keji kepada SBY.

Ia menganggap hal tersebut sebagai fitnah para buzzer. Dia menyebut, Pemkab Pacitan lah yang menawarkan bantuan hibah Rp9 Miliar, bukan atas permintaan SBY.

"Para Buzzer sudah fitnah keji soal pembangunan museum SBY ANI di Pacitan

Jatim. Pak SBY ditawarkan bantuan hibah 9 Miliar oleh Pemda Jatim untuk pembangunan. Pak SBY tidak pernah minta, bantuannya pun belum diterima. Niat baik Pemda Jatim, murni," cuitnya melalui akun Twitter @Andiarief\_, Rabu (17/2).

"Museum ini dalam proses pembangunan, akan selesai diperkirakan awal tahun depan," tulis Andi melanjutkan, dengan menampilkan video perkembangan pembangunan museum. Video itu juga memberi informasi bahwa pembangunan Museum SBY-ANI menggunakan dana yang bersumber dari donasi masyarakat. Disediakan rekening bagi masyarakat yang mau menyumbang. ● han

## Sepanjang 2020, Sebanyak 97 Hakim Diberikan Sanksi

JAKARTA (IM) - Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengungkapkan, ada 97 sanksi diberikan kepada hakim sepanjang 2020.

Adapun totalnya terdapat 162 hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparat peradilan di tahun 2020. Jumlah itu juga termasuk rekomendasi penjatihan sanksi disiplin dari Komisi Yudisial (KY) ke MA.

"Hakim dan Hakim Ad Hoc sebanyak 97 sanksi," kata Syarifuddin dalam acara "Laporan Tahunan MA Tahun 2020" secara virtual, Rabu (17/2).

Kemudian, 43 sanksi dijatuhkan kepada panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, dan juru sita pengganti. Sebanyak sembilan sanksi diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat sekretariat. Terakhir, sanksi

terhadap staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 13 hukuman.

Kendati demikian, ia tidak merinci apa saja pelanggaran yang dilakukan aparat peradilan tersebut hingga berujung pada penjatihan sanksi.

Sementara, menyangkut rekomendasi sanksi disiplin dari KY, Syarifuddin menuturkan, pihaknya menerima 52 rekomendasi selama tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 rekomendasi ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi oleh MA. Sementara sisanya disebutkan tidak dapat ditindaklanjuti.

"Berdasarkan alasan sebagai berikut, 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial, dan dua rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhkan sanksi oleh Mahkamah Agung," ucapnya. ● han

## 2020, Jumlah Denda dan Uang Pengganti Berdasar Putusan MA Lebih Rp5,6 Triliun

JAKARTA (IM) - Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengungkapkan, total denda dan uang pengganti yang terkumpul berdasarkan putusan MA sepanjang tahun 2020 mencapai lebih dari Rp 5,6 triliun.

Adapun putusan itu atas perkara pelanggaran lalu lintas, tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.648.296.731.748,5," ungkap Syarifuddin dalam acara "Laporan Tahunan MA Tahun 2020" secara virtual,

Rabu (17/2).

Sedangkan, denda dan uang pengganti yang terkumpul berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum dan militer yang telah inkrah sebesar Rp 52,85 triliun.

Berikutnya, Syarifuddin membeberkan jumlah uang yang terkumpul dari penarikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2020.

"Kontribusi dari penarikan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 71.710.015.121," ujarnya. ● han



IDN/ANTARA

## PENDUDUK MISKIN INDONESIA BERTAMBAH AKIBAT PANDEMI

Suasana di perkampungan warga prasejahtera di Kampung Ciputri, Kasemen, Serang, Banten, Rabu (17/2). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan akibat pandemi Covid-19, penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta jiwa atau sebesar 10,19 persen menjadi 27,55 juta jiwa pada periode September 2020 dibanding angka penduduk miskin periode sama tahun lalu sebesar 24,79 juta jiwa.

## Aliran Lahar Gunung Merapi Sudah Sampai 6 Km dari Puncak

YOGYAKARTA (IM) - Aliran Lahar hujan Gunung Merapi di Kali Boyong tertumpah sampai ke Boyong Over Dam (BOD) VII atau sekitar 6 kilometer dari puncak. Aliran lahar hujan di Kali Boyong ini terjadi pada Selasa (16/2) malam.

"Hujan sampai tadi malam material yang turun baru (sampai) sekitaran Turgo sampai BOD VII," ujar Kepala Seksi Mitigasi Bencana BPBD Sleman Joko Lelono, Rabu (17/2).

Joko Lelono menyampaikan lahar hujan yang terjadi di Kali Boyong telah mengisi Boyong Over Dam (BOD) VII. Bahkan, dari informasi di lapangan, BOD VII sudah mulai penuh. Namun aliran masih tertampung dan belum sampai mengalir ke BOD VI, sehingga saat ini kondisinya

masih kosong. "Kalau jaraknya sampai di Turgo itu sekitar 5,5 kilometer sampai 6 kilometer, kalau BOD VII itu 6 kilometer (dari puncak). Material baru mengisi di BOD VII itu, galian-galian (bekas galian penambangan pasir) yang dalamnya 1 meter sampai 2 meter sudah terisi," tegasnya.

Tebing yang ada di BOD VII lanjutnya cukup tinggi yakni sekitar 100 meter, sehingga aliran lahar hujan tidak sampai mengancam pemukiman warga di Turgo.

"Kalau sudah masuk Kemiri itu tebing kanan kirinya agak landai, lalu di sekitaran Pulowatu itu yang sebelah Timur tebingnya rendah. Jadi kalau kemungkinan meluap yang Kemiri ya ke Barat, kalau Pulowatu ke Timur," bebernya. ● meci

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK

Warga mengurus surat tanah di Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Bogor, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/2). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjelaskan pelaksanaan pergantian sertifikat tanah dari bentuk fisik menjadi elektronik (sertifikat-el) akan dilakukan secara bertahap.

# PKB Usulkan RUU Etika Informasi untuk Tertibkan Buzzer Juga Direvisi

Ketua PBNU, Robikin Emhas berpendapat bahwa UU ITE harus dikembalikan ke semangat dibentuknya peraturan tersebut, yakni melindungi transaksi elektronik.

JAKARTA (IM) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI mengemukakan pihaknya perlu mengusulkan agar dilakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengatur aktivitas buzzer di media sosial.

FPKB juga mendukung niat pemerintah merevisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Hemat saya akan lebih bagus jika diajukan draf RUU baru khusus tentang etika informasi, yang dapat menerbitkan informasi palsu, akun palsu bahkan buzzer palsu robotik yang bernaluri hoaks, fitnah,

Jazilul filosofi dan tujuan awal pembuatan UU ITE terkait transaksi elektronik bukan ujaran kebencian.

"Pasal-pasal karet yang ada di UU ITE sejatinya juga hasil revisi, namun masih parsial, multi tafsir dan mudah melien-ceng," tandasnya.

## Prinsip Semula

Ketua PBNU, Robikin Emhas berpendapat bahwa UU ITE harus dikembalikan ke semangat dibentuknya peraturan tersebut, yakni melindungi transaksi elektronik.

"Hemat saya, UU ITE harus dikembalikan kepada semangat dibentuknya, diantaranya adalah untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana kita maklum, di era teknologi digital ini, transaksi elektronik sering marah dan menjadi kelaziman, banyak penipuan, itu lah yang penting untuk menjadi perhatian," jelasnya.

Namun, jelas Robikin, tidak berarti bahwa UU ITE tidak boleh memuat larangan

mengenai ujaran kebencian. Menurutnya, hoaks, ujaran kebencian yang berdampak serius berupa tindakan adu domba antara golongan kelompok masyarakat penganut agama, perlu diwadahi dalam UU ITE.

"Seninya adalah bagaimana mengatur berbagai norma, tetapi tidak mengungkung kemerdekaan berpendapat

seperti yang dijamin konstitusi. Tapi jangan karena kebebasan berpendapat masyarakat dibiarakan mengalami keterperosokan, keutuhan bangsa dengan adanya ujaran kebencian yang dilegalisasi," jelasnya.

"Menurut saya review UU ITE yang dilakukan pemerintah itu tepat," ungkapnya. ● meci

## Kejagung Periksa 8 Saksi Terkait Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA (IM) - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa delapan orang saksi terkait kasus korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (17/2).

Delapan saksi yang diperiksa yaitu, II selaku dealer PT Samuel Asset Manajemen, TYS selaku Direktur PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, A selaku PIC PT Indo Premier Sekuritas, dan LW selaku PIC PT Schroder Investment Management Indonesia.

Kemudian, I selaku Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia, KBW selaku Deputi Direktur Pasar Modal BPJS Ketenagakerjaan, NHP selaku Kepala Urusan Pengelolaan Aset dalam Pengawasan Khusus BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017, dan YTF selaku Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS

Ketenagakerjaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (17/2).

Sebelumnya, Selasa (16/2), penyidik Kejagung memeriksa 8 saksi. Penyidikan dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dimulai sejak 19 Januari 2021. Sejumlah dokumen disita Kejagung saat melakukan penggeledahan di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada 18 Januari 2021. Pemeriksaan saksi dimulai sejak 19 Januari 2021

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyatakan, nilai kerugian tersebut masih dianalisis perihal kemungkinan risiko bisnis.

"Kalau kerugian bisnis, apakah analisisnya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan masih dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS

## Guru yang Unggah Slip Gaji di Medsos Tak Jadi Dipecat, Kepsek Minta Maaf

BONE (IM) - Hervina (34), guru honorer yang dipecat Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 169 Sadar, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, lantaran mengunggah rincian gaji senilai Rp 700.000 selama empat bulan ke media sosial, akhirnya bisa kembali mengajar.

Kepala SDN 169 Sadar, Hamsinah, mengatakan akan kembali menerima Hervina mengajar di sekolahnya saat diundang dalam rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone, Selasa (16/2).

Hamsinah juga meminta maaf atas pemecatan yang telah dilakukannya. Hervina pun bersyukur kembali bisa mengajar di sekolah tempatnya mengajar selama 16 tahun.

"Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan kesalahpahaman ini dan Ibu Kepala Sekolah yang selama ini saya anggap sebagai orangtua telah

meminta maaf," kata Hervina saat dihubungi, Rabu (17/2).

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Andi Syamsiar Halid, yang turut hadir dalam RDP tersebut menegaskan bahwa Hervina kembali mengajar di SD Negeri 169 Sadar.

Dinas Pendidikan Bone juga akan memperbarui surat keputusan (SK) pengangkatan honorer Hervina yang telah berakhir pada 2020.

"SK pengangkatan honorer akan kami perbarui karena SK yang dipegang oleh Hervina sebenarnya berakhir di tahun 2020," kata Andi Syamsiar Halid saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Sebelumnya diberitakan, kabar tentang Hervina, warga Dusun Lakariki, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpo, ini menjadi viral usai dipecat lantaran mengunggah rincian gaji di media sosial.

Pemecatan itu dilakukan suami dari kepala sekolah tempatnya mengajar dan dilakukan melalui pesan singkat. ● meci

## 6 Orang Lagi Korban Longsor di Nganjuk Belum Ditemukan

NGANJUK (IM) - Satu korban korban longsor di Dusun Selo, Desa/Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (17/2). Dengan demikian, masih 6 lagi korban yang belum ditemukan.

Satu korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan tertimbun reruntuhan rumah. Saat ini korban dievakuasi ke puskesmas setempat untuk proses identifikasi.

Kepala Basarnas Surabaya, Hari Adi Purnomo mengatakan, dengan penemuan satu korban siang ini, jumlah korban hilang yang belum ditemukan tersisa 6 orang.

"Dari 21 korban hilang, dua ditemukan selamat dan 13 lainnya meninggal dunia, jadi tinggal 6 orang lagi. Mudah-

mudahan semua segera ditemukan," ujarnya, Rabu (17/2).

Adi mengatakan, salah satu titik yang menjadi fokus pencarian utama yakni lokasi yang sebelumnya telah dideteksi oleh anjing pelacak.

"Saat ini tim masih melakukan pencarian di titik yang sama," ujarnya.

Diketahui, bencana longsor melanda sejumlah rumah di Dusun Selo, Desa/Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Minggu (14/2) malam. Akibat musibah ini sebanyak 9 rumah tertimbun, 21 orang hilang dan belasan lainnya luka-luka.

## 101 Warga Mengungsi

Hingga Rabu (17/2) pagi, sebanyak 101 warga Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa

Timur, masih mengungsi di halaman SD Negeri 3 Ngetos.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan, BPBD Nganjuk telah memberikan pelayanan kepada warga yang mengungsi pascalongsor. BPBD dengan unsur terkait lainnya mengoperasikan dapur umum dan pelayanan kesehatan.

"Di samping warga yang mengungsi, per Selasa (16/2), pukul 20.19 WIB, BPBD setempat mencatat sebanyak 54 KK atau 186 warga terdampak," kata Raditya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2).

Bencana longsor mengakibatkan 12 warga meninggal dunia dan 20 luka-luka. Mereka yang luka mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat. ● meci



IDN/ANTARA

## PEMAKAMAN PRAJURIT TNI GUGUR DALAM TUGAS

Prajurit Batalyon Infanteri 406/Candra Kusuma menggelar upacara pemakaman secara militer bagi Anggota Yonif 400/BR Pratu Anumerta Ginanjar Arianda di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (17/2). Pratu Anumerta Ginanjar Arianda mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan satu tingkat setelah gugur dalam kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Pos Peninjauan Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, Senin (15/2) pagi.

## PENGUMUMAN

Direksi PT. M&S Apparel berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan keseluruhan saham Perseroan yang dimiliki oleh M&S Corporation, Tuan Park Chanmoon, dan Tuan Park Kyoung Suh.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor Perseroan dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat :

PT. M&S Apparel  
Jalan Raya Cemplang RT. 001, RW. 001,  
Cemplang, Cibungbulang, Kabupaten Bogor  
Telepon : +62 251 864 0555

Pengumuman ini dimuat dalam rangka memenuhi perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jakarta, 18 Februari 2021  
PT. M&S Apparel  
Direksi